

DESIGNMAP
Foto Tebaldi Indonesia
Jl. Sepuluh Nopember 100
61132 Jakarta Pusat, Telp. 021-65931000
www.designmap.com
G. P. Tebaldi & Co. 100, JALAN SEPULUH NOPEMBER

JAYAPURA TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami Panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa Atas Tuntunanya sehingga Buku Singkat Rencana Aksi Pembangunan Kesehatan Khusus 16 Kabupaten Bermasalah Kesehatan di Papua dapat di susun dengan baik walaupun masih terdapat kekurangan. Kiranya buku ini dapat menjadi acuan Bagi Rencana Intervensi Pembangunan Kesehatan Setiap Tahun Bagi Pengambil Kebijakan Pembangunan dari tingkat Pusat hingga Provinsi Papua

Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi semua yang telah berpartisipasi memberikan data, bantuan analisis sehingga buku ini dapat diselesaikan.

Hormat Kami

Kepala Dinas Kesehatan Papua

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan, Fungsi dan Nilai Strategis Rencana Aksi Program.....	4
C. Dasar Hukum	6
Bab II Analisa Situasi	8
A. Situasi Umum Daerah	8
Bab III Isu-Isu Strategis dan Analisa Kesenjangan	18
A. Analisis Kesenjangan	18
B. Isu Strategis	22
BAB IV Indikator dan Target	29
A. Indikator	29
B. Target	31
BAB V Strategi Tujuan Program kegiatan Sasaran, Luaran dan waktu.....	35
Lampiran	
Program Kegiatan Dalam Rangka Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesehatan di 16 Kabupaten bermasalah kesehatan di Papua	
Pemetaan program dan kegiatan dalam SIPD Dinas Kesehatan Papua Dalam rangka mendukung rencana aksi 16 kabupaten bermasalah Kesehatan Di Papua kebutuhan selama lima tahun	
Pencapaian Tujuan, Sasaran Indikator Dan Target Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesehatan Pada 16 Daerah Bermasalah Kesehatan Di Papua Tahun 2021 -2025	
Time line atau jangka waktu pelaksanaan rencana aksi	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2019 - 2023 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua No. Menindaklanjuti hal tersebut, Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyusun Rencana Aksi sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan Program Kegiatan untuk mengintervensi 16 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang merupakan beban pembangunan Kesehatan di Provinsi Papua. Rencana Aksi Program Sub Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2022-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat Program Kesehatan dalam upaya meningkatkan percepatan pembangunan Kesehatan di Provinsi Papua khususnya 16 Kabupaten intervensi.

B. Tujuan, Fungsi dan Nilai Strategis Rencana Aksi Program

Rencana Aksi Program Percepatan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Papua adalah dokumen kebijakan yang berisi komitmen untuk melakukan serangkaian tindakan, tugas atau langkah-langkah yang dirancang untuk melaksanakan program Intervensi di 16 Kabupaten yang sangat rendah cakupan pembangunan kesehatannya. Rencana Aksi ini mengacu pada kebijakan nasional maupun kebijakan Daerah terkait (RPJMN, Renstra Kemenkes, RPJMD Provinsi Papua, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan dokumen perencanaan lainnya). Rencana Aksi ini disusun dengan maksud sebagai dasar dan pedoman bagi Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten intervensi dalam melakukan upaya-upaya percepatan pembangunan kesehatan.

Rencana Aksi Program Percepatan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Papua memiliki tujuan yaitu :

- a. Memberikan acuan dan pedoman bagi Dinas Kesehatan Provinsi Papua maupun Kabupaten Intervensi untuk meningkatkan komitmen dalam percepatan pembangunan kesehatan.
- b. Memberikan acuan dalam membuat Perencanaan dan Penganggaran terkait percepatan pembangunan kesehatan kabupaten Intervensi.

- c. Memberikan acuan dalam menyusun regulasi terkait percepatan pembangunan kesehatan kabupaten intervensi.
- d. Memberikan acuan untuk melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi agar dicapai sinergi dalam upaya bersama meningkatkan pembangunan kesehatan.

Rencana Aksi Program Percepatan Pembangunan Kesehatan berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten dalam upaya-upaya percepatan pembangunan kesehatan.
- b. Pedoman untuk menjembatani koordinasi dan integrasi program-program Pelayanan kesehatan yang terkait dengan upaya percepatan pembangunan kesehatan.
- c. Pedoman untuk mensinergikan berbagai upaya percepatan pembangunan kesehatan antar Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya.
- d. Dokumen bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memantau pelaksanaan program percepatan pembangunan kesehatan Kabupaten intervensi.

Rencana Aksi Program Percepatan Pembangunan Kesehatan memiliki nilai strategis sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk didalamnya Pelayanan Kesehatan merupakan tugas utama Pemerintah Daerah. Pembangunan kesehatan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal yang menjadi urusan wajib, yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.
- b. Strategi Program Pembangunan Kesehatan yang tertuang di dalam Rencana Aksi Program lebih banyak mengarah pada upaya-upaya dalam melakukan intervensi terhadap kabupaten yang masih menjadi beban pembangunan kesehatan di Provinsi Papua.
- c. Penyusunan Rencana Aksi Program Percepatan Pembangunan Kesehatan yang tepat dan jaminan penganggaran yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan hal-hal yang akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih bersemangat melakukan upaya-upaya percepatan pembangunan kesehatan.

C. Dasar Hukum

Regulasi-regulasi berikut menjadi peraturan dan rambu-rambu dalam pelaksanaan percepatan pembangunan kesehatan agar penyelenggaraan program dan kegiatannya sesuai aturan dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Adapun landasan hukum dalam penyusunan rencana aksi program percepatan pembangunan kesehatan Provinsi Papua diantaranya yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- e. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis SPM Bidang Kesehatan;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2013-2018;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua.

- m. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 7);

BAB II

ANALISIS SITUASI

A. Situasi Umum Daerah

1. Aspek Geografi

Provinsi Papua adalah provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua menunjukkan Provinsi Papua memiliki luas 312.224,37 km². Kabupaten Merauke menjadi kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Papua yang menempati 14,87 persen wilayah Provinsi Papua atau seluas 46.430,54 km². Sebaliknya Kabupaten Supiori menjadi kabupaten dengan wilayah terkecil di Provinsi Papua dengan luas 691,67 km² atau menempati 0,20 persen wilayah Provinsi Papua. Kota Jayapura menempati 0,30 persen wilayah Provinsi Papua atau memiliki luas 950,38 km². Provinsi Papua secara geografis terletak antara garis koordinat 10 00' LU - 90 30' LS dan 1340 BT - 1410 01' BT.

Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Provinsi Papua. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua menunjukkan Kabupaten Merauke dan Kabupaten Supiori menjadi kabupaten yang memiliki jarak terjauh dengan ibukota Provinsi Papua yaitu 662 km dan 650 km. Sebaliknya, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom adalah kabupaten dengan jarak terdekat dengan ibukota Provinsi Papua yaitu 27 km dan 71 km. Provinsi Papua secara administratif berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Samudra Pasifik

Sebelah Selatan : Laut Arafuru

Sebelah Barat : Papua Barat

Sebelah Timur : Papua Nugini

Provinsi Papua hingga tahun 2019, terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota dengan perkembangan jumlah distrik 576 dan 5.549 kampung/kelurahan. Dari kabupaten ini dibagi dalam kelompok geografis sebagai berikut :

Tabel 2.1

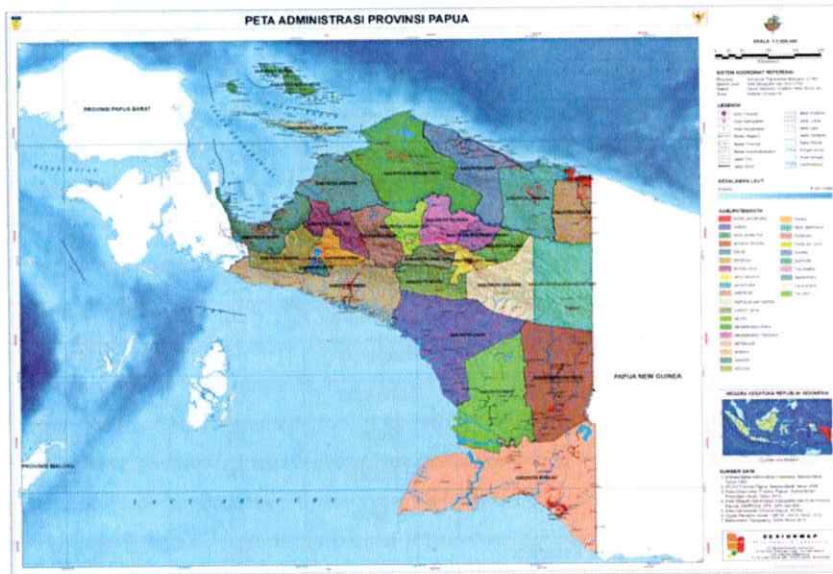
Nama Kabupaten, Ibu Kota, Jumlah Distrik dan Kampung

Nama Kabupaten	Ibu Kota	Distrik	Kampung
Dataran Mudah Akses		129	1.129
Kab. Biak Numfor	Biak	19	262

Kab. Jayapura	Sentani	19	144
Kab. Keerom	Arso	11	91
Kab. Merauke	Merauke	20	190
Kab. Nabire	Nabire	15	89
Kab. Sarmi	Sarmi	19	111
Kab. Kep. Yapen	Serui	16	165
Kota Jayapura	Jayapura	5	39
Kab. Supiori	Sorendiweri	5	38
Dataran Sulit Akses		102	819
Kab. Asmat	Agats	23	221
Kab. Boven Digoel	Tanah Merah	20	111
Kab. Mamberamo Raya	Bumerso	9	59
Kab. Mamberamo Tengah	Kobakma	5	59
Kab. Mappi	Kepi	15	164
Kab. Mimika	Timika	18	147
Kab. Waropen	Waren	12	117
Pegunungan Tengah		201	3.542
Kab. Deiyai	Tigi	5	67
Kab. Dogiyai	Kigamani	10	79
Kab. Intan Jaya	Sugapa	8	97
Kab. Jayawijaya	Wamena	40	331
Kab. Lanny Jaya	Tiom	39	356
Kab. Nduga	Kenyam	32	248
Kab. Paniai	Enarotali	24	216
Kab. Pegunungan Bintang	Oksibil	34	277
Kab. Puncak	Ilaga	25	206
Kab. Puncak Jaya	Mulia	26	302
Kab. Tolikara	Karubaga	46	545
Kab. Yahukimo	Dekai	51	518
Kab. Yalimo	Elelim	5	300
Jumlah		345	5.490

(sumber : Papua dalam angka 2021)

Gambar 2.1
Peta Administrasi Provinsi Papua



2. Aspek Demografi

Hasil proyeksi penduduk Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 4.303.707 orang dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kota Jayapura sebanyak 398.478 orang dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kabupaten Supiori yaitu sebanyak 22.547. Secara lebih lanjut, komposisi laki-laki di Provinsi Papua lebih banyak dibandingkan perempuan. Persentase penduduk perempuan adalah sebanyak 46,7 persen atau 2.008.891 penduduk. Jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki di Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 2.294.811 atau sebesar 53,3% dari Total penduduk.

Secara rata-rata, kepadatan penduduk di Provinsi Papua adalah sebesar 13,78 km² yang berarti secara rata-rata untuk setiap satu km² wilayah Provinsi Papua ditempati oleh 14 orang penduduk. Kota Jayapura menjadi wilayah terpadat di Provinsi Papua dengan kepadatan penduduk 309,02 penduduk per km². Sebaliknya Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sebesar delapan penduduk per sepuluh km².

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020

No	Kabupaten/kota	Jumlah penduduk 2020
1.	Kab. Merauke	230.932 jiwa
2.	Kab. Jayawijaya	269.553 jiwa
3.	Kab. Jayapura	166.171 jiwa
4.	Kab. Nabire	169.136 jiwa
5.	Kab. Kepulauan Yapen	112.676 jiwa
6.	Kab. Biak Numfor	134.650 jiwa
7.	Kab. Paniai	220.410 jiwa
8.	Kab. Puncak Jaya	224.527 jiwa
9.	Kab. Mimika	311.969 jiwa
10.	Kab. Boven Digoel	64.285 jiwa
11.	Kab. Mappi	108.295 jiwa
12.	Kab. Asmat	110.105 jiwa
13.	Kab. Yahukimo	350.880 jiwa
14.	Kab. Pegunungan Bintang	77.872 jiwa
15.	Kab. Tolikara	236.986 jiwa
16.	Kab. Sarmi	41.515 jiwa
17.	Kab. Keerom	61.623 jiwa
18.	Kab. Waropen	33.943 jiwa
19.	Kab. Supiori	22.547 jiwa
20.	Kab. Mamberamo Raya	36.483 jiwa
21.	Kab. Nduga	106.533 jiwa
22.	Kab. Lanny Jaya	196.399 jiwa
23.	Kab. Mamberamo Tengah	50.685 jiwa
24.	Kab. Yalimo	101.973 jiwa
25.	Kab. Puncak	114.741 jiwa
26.	Kab. Dogiyai	116.206 jiwa
27.	Kab. Intan Jaya	135.043 jiwa
28.	Kab. Deiyai	99.091 jiwa
29.	Kota Jayapura	398.478 jiwa

Papua	4.303.707 jiwa
--------------	-----------------------

(Sumber : Papua Dalam Angka 2021).

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2017

No	Kabupaten/kota	Jenis Kelamin		Jumlah penduduk 2017
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kab. Merauke	114.429	108.960	223.389 jiwa
2.	Kab. Jayawijaya	109.201	103.610	212.811 jiwa
3.	Kab. Jayapura	66.307	59.668	125.975 jiwa
4.	Kab. Nabire	76.913	68.188	145.101 jiwa
5.	Kab. Kepulauan Yapen	48.819	46.188	95.007 jiwa
6.	Kab. Biak Numfor	74.794	69.903	144.697 jiwa
7.	Kab. Paniai	88.302	81.891	170.193 jiwa
8.	Kab. Puncak Jaya	68.430	55.161	123.591 jiwa
9.	Kab. Mimika	118.316	92.097	210.413 jiwa
10.	Kab. Boven Digoel	35.673	30.536	66.209 jiwa
11.	Kab. Mappi	47.586	47.089	94.671 jiwa
12.	Kab. Asmat	47.372	45.537	92.909 jiwa
13.	Kab. Yahukimo	95.793	91.228	187.021 jiwa
14.	Kab. Pegunungan Bintang	38.015	35.458	73.473 jiwa
15.	Kab. Tolikara	74.188	62.388	136.576 jiwa
16.	Kab. Sarmi	20.395	17.815	38.210 jiwa
17.	Kab. Keerom	29.483	25.535	55.018 jiwa
18.	Kab. Waropen	15.177	14.303	29.480 jiwa
19.	Kab. Supiori	9.712	9.392	19.104 jiwa
20.	Kab. Mamberamo Raya	11.394	10.919	22.313 jiwa
21.	Kab. Nduga	53.702	43.310	97.012 jiwa
22.	Kab. Lanny Jaya	94.378	82.309	176.687 jiwa
23.	Kab. Mamberamo Tengah	25.271	22.216	47.487 jiwa
24.	Kab. Yalimo	32.418	28.404	60.822 jiwa

25.	Kab. Puncak	56.425	51.397	107.822 jiwa
26.	Kab. Dogiyai	47.081	47.916	94.997 jiwa
27.	Kab. Intan Jaya	24.228	24.090	48.318 jiwa
28.	Kab. Deiyai	37.001	35.205	72.206 jiwa
29.	Kota Jayapura	157.710	135.980	293.690 jiwa
Papua				3.265.202 jiwa

(Sumber : Papua Dalam Angka 2018).

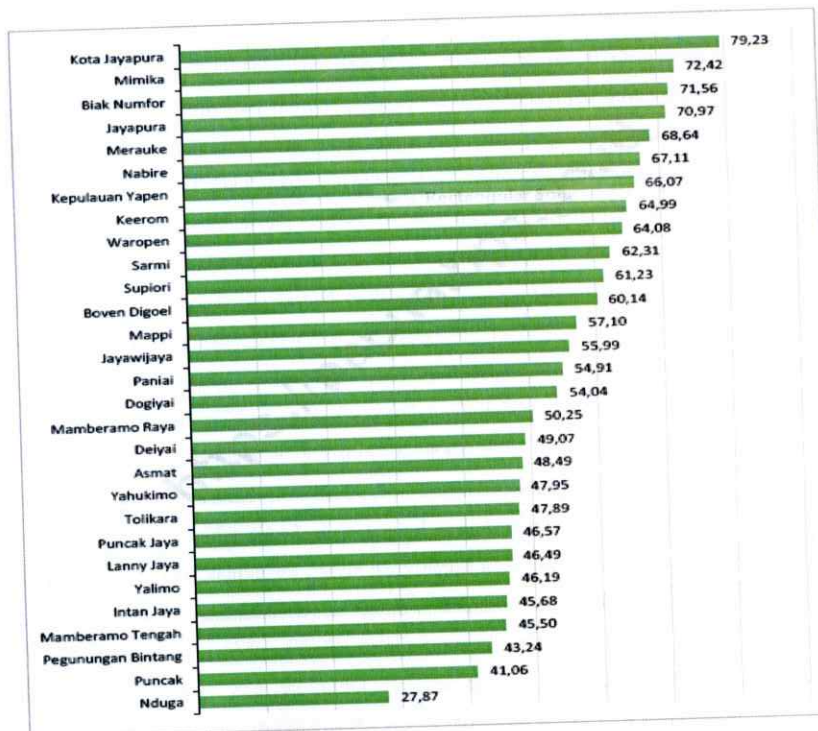
3. Aspek Sosial Ekonomi

Pada bulan September 2017 Garis Kemiskinan (GK) di Provinsi Papua mengalami peningkatan menjadi Rp. 464.056 / kapita / bulan yang artinya jika seorang individu memiliki pendapatan selama sebulan dibawah Rp. 440.021 maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Persentase penduduk miskin di Provinsi Papua pada bulan september 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan maret 2017 sebesar 0,14 persen. Namun jika dibandingkan dengan kondisi empat tahun terakhir yaitu bulan Maret 2013, persentase penduduk miskin di Provinsi Papua mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 3,37persen.

Pada tahun 2017, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua mencapai 59,09. Pencapaian pembangunan manusia pada tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua pada tahun 2017 cukup bervariasi. Kabupaten Nduga merupakan kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi Papua dengan nilai sebesar 27,87. Dilihat menurut komponen pembentuk IPM, nilai setiap komponen Kabupaten Nduga menjadi yang paling rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Papua. Nilai tiap komponen IPM tahun 2017 di Kabupaten Nduga yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir sebesar 54,60 tahun yang berarti tiap bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga usia 54,60 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 2,64 tahun yang berarti anak-anak usia 7 tahun di Kabupaten Nduga memiliki peluang untuk bersekolah selama 2,64 tahun atau hanya sampai kelas 2 SD. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,71 tahun yang berarti penduduk Kabupaten Nduga usia 25 tahun ke atas secara rata-rata menempuh pendidikan 0,71 tahun atau tidak tamat kelas 1 SD dan angka pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) Rp. 3,97 juta per tahun.

Sebaliknya, Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua tercatat memiliki pembangunan manusia tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Papua. Pada tahun 2017, IPM Kota Jayapura mencapai 79,23. Untuk dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak, Kota Jayapura juga menempati posisi pertama dimana nilai untuk masing-masing indikatornya adalah HLS sebesar 14,98 tahun, RLS sebesar 11,15 tahun, dan pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) mencapai Rp. 14,78 juta per tahun kecuali untuk dimensi umur panjang dan hidup sehat, posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Mimika dengan nilai UHH saat lahir mencapai 71,93 tahun.

Grafik 2.1 Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2017



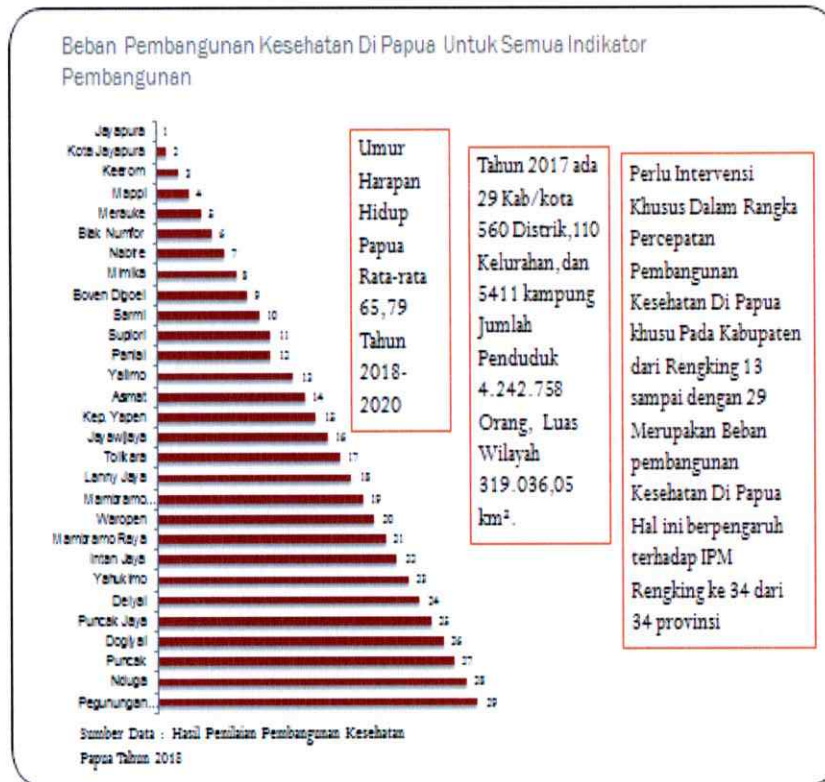
Sumber : Papua dalam angka 2018

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua atas dasar harga berlaku (ADHB) selama periode tahun 2014 hingga 2017 menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2017 PDRB ADHB Provinsi Papua sebesar Rp. 191.615,41 miliar mengalami peningkatan sebesar 43,72 persen dari tahun 2014. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB juga dihitung atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Pada tahun 2017, PDRB ADHK di Provinsi Papua adalah sebesar Rp. 148.823,63 miliar.

Pada tahun 2017, struktur perekonomian Provinsi Papua didominasi oleh kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang memberikan andil sebesar 36,07 persen. Setelah itu diikuti oleh kategori lapangan usaha Konstruksi dengan sumbangan sebesar 12,92 persen dan kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mampu menyumbang 11,63 persen. Sementara itu, sumbangan kategori lapangan usaha lainnya di bawah 10 persen.

4. Aspek Pembangunan Kesehatan Provinsi Papua

Aspek pembangunan kesehatan di provinsi Papua mempunyai tantangan sendiri-sendiri berdasarkan data evaluasi capaian pembangunan kesehatan Tahun 2013-2018 dapat di gambarkan dalam tabel dibawah ini :



Data Evaluasi capaian pembangunan kesehatan tahun 2013 -2018 diatas menggambarkan bahwa kabupaten dengan pelayanan kesehatan terbaik dengan posisi nomor 1 sampai 13, perlu intervensi khusus adalah pada 16 daerah bermasalah kesehatan dipapua untuk semua indikator pembangunan kesehatan, sedangkan khusus kabupaten kepulauan yapen sejauh ini sudah baik dan mempunyai akses yang mudah walaupun berada dikepulauan atau daerah pesisir papua disamping daerah lainya, begitupun asmat di daerah pesisir namun sulit, yalimo sudah baik namun berada didaerah yang sulit,begitu pun dengan paniai hal ini jika melihat data anggaran yang sejauh ini sudah dianggarkan oleh pemerintah Pusat melalui dana alokasi khusus (DAK), Pemerintah Provinsi Papua Melalui Dana Otonomi Khusus maupun sumber anggaran lainnya yang dianggarkan oleh pemerintah pusat berbanding terbalik dengan kinerja layanan kesehatan pada kabupaten –kabupaten tersebut diatas, selain itu masalah sasaran jumlah penduduk serta letak geografis, ketersediaan sumberdaya kesehatan menjadi faktor penting didalamnya.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS DAN ANALISIS KESENJANGAN

Pada bagian sebelumnya telah memaparkan kondisi umum Provinsi Papua serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Percepatan pembangunan Kesehatan. Pada bagian ini akan menjelaskan isu-isu strategis yang dapat didorong untuk pelaksanaan percepatan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua dapat di jelaskan dalam tabel berikut :

A. Analisis Kesenjangan

Tabel
Indikator dan Target

No	INDIKATOR	Base Line Tahun 2020	Satuan	Target	Target	Target	Target	Target	Gap
				2021	2022	2023	2024	2025	
Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas									
1	Cakupan Distrik memiliki minimal Puskesmas yang bersertifikat akreditasi	46	%	47	50	52	51	60	
2	Cakupan rumah sakit yang tersertifikasi akreditasi	56	%	60	80	85	90	100	
3	Cakupan orang asli papua tidak mampu yang terlayani menggunakan jaminan Kesehatan Papua	100	%	100	100	100	100	100	
4	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	27,2	%	30	35	40	60	100	
5	Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	44,20	%	50	60	70	80	85	15
6	Angka Kematian Ibu	199,6	Ibu	190	185	180	175	170	
7	AngkaKematian Bayi	6	Bayi	6	6	6	5	0	
8	Prevalensi balita sangat kurus dan kurus (Stunting)	19	%	18	17	16	15	14	14
9	Cakupan masyarakat akses terhadap air bersih	30,23	%	33	36	40	41	45	

No	INDIKATOR	Base Line Tahun 2020	Satuan	Target	Target	Target	Target	Target	Gap
				2021	2022	2023	2024	2025	
10	Cakupan keluarga akses terhadap sanitasi								
11	Cakupan PHBS	45	%	50	55	60	65	70	
12	Cakupan Posyandu aktif	31	%	40	50	55	60	70	30
13.	Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	180	Kampung	190	200	240	250	260	
B Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit									
1	Cakupan Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria	0	Kab/kota	0	0	0	2	1	
2	Cakupan odha yang mendapatkan pengobatan ARV rutin	25,36	%	30	40	50	60	70	30
3	Cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate / CDR) yang diobati	40	%	60	70	80	90	100	
4	Jumlah kumulatif Kabupaten/Kota dengan 50% Desa/Kelurahan yang melaksanakan posbindu	31,0	%	45	50	52	55	60	40
5	Cakupan Imunisasi dasar lengkap (IDL)	70,1	%	75	80	85	90	92	8
7	Cakupan pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	100	%	100	100	100	100	100	0
8	Jumlah komulatif Kabupaten/Kota dengan angka prevalensi < 1 per	13	Kab/Kota	14	15	16	20	22	

No	INDIKATOR	Base Line Tahun 2020	Satuan	Target	Target	Target	Target	Target	Gap
				2021	2022	2023	2024	2025	
	10.000 Penduduk								
9	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi filaria	5	Kab/kota	7	10	15	17	20	9
C. Peningkatan Sumberdaya Kesehatan									
1	Cakupan Puskesmas yang memenuhi standar ketenagaan minimal 5 jenis tenaga (perawat, bidan, kesling, gizi, analis kesehatan, SKM)	68	PKM	80	100	120	150	200	220
2	Cakupan puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	100	%	100	100	100	100	100	0
3	Pelaksanaan Diklat sesuai standar	60	%	65	70	80			
D. Peningkatan Pelayanan Kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, perluar dan tertentu									
1	Cakupan puskesmas sesuai standar di daerah perbatasan	70	%	70	75	80	90	100	0
2	Jumlah Kabupaten Kota Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil	10	15	17	20	22	24	29	0
3	Jumlah Kabupaten Kota Yang Berkomitmen Untuk Menyediakan SDM Tenaga Kesehatan Bagi Layanan Kesehatan di Daerah	10	15	17	20	22	24	29	0

No	INDIKATOR	Base Line Tahun 2020	Satuan	Target	Target	Target	Target	Target	Gap
				2021	2022	2023	2024	2025	
	Sulit, Terpencil dan Terluar								
E. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik									
1	Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)	80	Angka/Nilai	80	80	83,2	88,2	90,0	10

B. Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi masalah di lapangan dapat dilihat kesenjangan antara realisasi dengan target. Kesenjangan tersebut merupakan status kondisi yang harus diselesaikan agar tercapai kondisi ideal. Diperlukan analisa masalahnya, ditemukan penyebabnya, seberapa besar capaiannya, faktor penghambat dan pendukungnya. Dari analisa masalah tersebut dapat ditarik kesimpulan untuk perumusan Isu Strategis. Isu strategis percepatan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua diklasifikasikan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua dan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang kemudian telah disusun dalam rencana aksi percepatan pembangunan 16 daerah bermasalah kesehatan di Papua adapun 16 daerah bermasalah kesehatan tersebut adalah :

1. Kabupaten Nduga Papua
2. Kabupaten Intan Jaya
3. Kabupaten Yahukimo
4. Kabupaten Tolikara
5. Kabupaten Yalimo
6. Kabupaten Puncak
7. Kabupaten Pegunungan Bintang
8. Kabupaten Dogiyai
9. Kabupaten Deiyai
10. Kabupaten Mamberamo Raya
11. Kabupaten Waropen
12. Kabupaten Puncak Jaya
13. Kabupaten Lany Jaya
14. Kabupaten Jayawijaya
15. Mamberamo Tengah
16. Kabupaten Asmat

Beberapa Kabupaten/kota diatas telah dilakukan penilaian berdasarkan hasil pembangunan kesehatan Papua tahun 2018 sudah baik namun perlu mendapat perhatian lagi mengingat masih terdapat permasalahan pembangunan kesehatan yang kami jumpai di Kabupaten/Kota ini.

Rencana aksi diatas dijabarkan dalam setiap tahun fokus intervensi dari Masing-masing kabupaten sehingga output secara keseluruhan mencapai 16 kabupaten di tahun 2025 terlampir dalam time line atau jangka waktu pelaksanaan rencana aksi.

No	INDIKATOR	Analisis Masalah	Isu Strategis
			bermasalah kesehatan
6	Angka Kematian Ibu	Masih tingginya angka kematian ibu sebesar 199,6 lebih banyak di 16 daerah bermasalah kesehatan	Masih tingginya angka kematian ibu di 16 Daerah bermasalah kesehatan
7	Angka Kematian Bayi	Angka kematian bayi di Papua cukup tinggi dalam data yang di laporkan ada 6/1000 kelahiran lebih khusus pada 16 daerah bermasalah kesehatan	Masih tingginya angka kematian Ibu dan anak di 16 Kabupaten bermasalah kesehatan akibat Banyaknya Ibu hamil yang tidak mau mengakses layanan kesehatan kondisi geografis ikut mempengaruhi
8	Prevalensi balita sangat kurus dan kurus (Stunting)	Angka Prevalensi Gizi buruk atau stunting di Papua cukup tinggi yaitu sebesar 19 % namun dari Tahun ke Tahun telah berkurang dengan intervensi yang di lakukan oleh pemerintah lebih khusus pada 16 daerah bermasalah kesehatan	Angka gizi buruk di papua cukup tinggi banyak balita yang tinggal di akses sulit di 16 Daerah bermasalah kesehatan
9	Cakupan masyarakat akses terhadap air bersih	Ada 30,23 % penduduk papua yang menikmati air bersih sebagian	69,77 % warga papua tidak mengakses air bersih perlu perhatian khusus lebih khusus di 16 Daerah Bermasalah Kesehatan
10	Cakupan keluarga akses terhadap sanitasi		
11	Cakupan PHBS	Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dari penduduk papua sebesar 45%	55 % warga papua mempunyai perilaku hidup bersih dan sehat yang masih rendah lebih khusus pada 16 Daerah Bermasalah Kesehatan
12	Cakupan Posyandu aktif	Masih rendahnya posyandu aktif di papua sebesar 31 % posyandu yang aktif	69 % Posyandu di Papua tidak aktif lebih banyak di 16 Daerah Bermasalah

Tabel

Indikator, Analisa masalah dan Isu strategis

No	INDIKATOR	Analisis Masalah	Isu Strategis
A Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas			
1	Cakupan Distrik memiliki minimal Puskesmas yang bersertifikat akreditasi	Pada 16 kabupaten/kota ini secara umum luas wilayahnya cukup besar rasio persebaran penduduk dengan fasilitas kesehatan atau puskesmas cukup jauh kondisi ini menyulitkan program akreditasi sehingga secara papua masih sangat rendah dari 420 pkm masih banyak yang belum akreditasi tahun 2018	Masih 12,85 % Puskesmas yang terakreditasi dari 420 PKM sebagian besar di 16 Kabupaten/kota tahun 2018
2	Cakupan rumah sakit yang tersertifikasi akreditasi	Dari 45 Rumah sakit di Papua sudah 56 % yang sudah diakreditasi tahun 2018	Dari 56 % Rumah sakit yang terakreditasi di Papua masih banyak di 16 Kabupaten/Kota
3	Cakupan orang asli papua tidak mampu yang terlayani menggunakan jaminan Kesehatan Papua	Persebaran penduduk Asli Papua Lebih banyak berada di 16 Kabupaten/Kota bermasalah kesehatan sehingga program kartu papua sehat sudah menjangkau seluruh orang asli papua di 16 kab/kota ini	100 % Orang asli papua sudah terlayani menggunakan kartu papua sehat
4	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	27,2 % Ibu hamil yang melakukan kunjungan kehamilan secara lengkap masih tingginya ibu hamil yang belum mengakses layanan kesehatan khusus di 16 Kabupaten/Kota yang bermasalah kesehatan	83,8 % ibu hamil belum melakukan kunjungan kehamilan sebanyak 4 kali atau lengkap ke layanan kesehatan
5	Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	44,20 % ibu melahirkan di fasilitas kesehatan masih banyak yang belum terutama di 16 Kabupaten bermasalah kesehatan	66,80 % Ibu hamil yang belum melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan lebih tinggi di 16 kabupaten

No	INDIKATOR	Analisis Masalah	Isu Strategis
7	Cakupan pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	Kejadian luar biasa alau KLB dipapua cukup tinggi terutama pada masalah-masalah kesehatan lebih khusus 16 Kabupaten bermasalah kesehatan	Tinginya kejadian luar biasa dipapua membutuhkan perhatian khusus terutama 16 Kabupaten/kota
8	Jumlah kumulatif Kabupaten/Kota dengan angka prevalensi kusta < 1 per 10.000 Penduduk	Kabupaten/kota yang mempunyai prevalensi kusta kurang < 1 per 10.000 penduduk sebanyak 13 kabupaten/kota	Masih terdapat 16 kabupaten kota yang mempunyai prevalensi kusta > 1 per 10.000
9	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi filaria	Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi filariasis sebanyak 5 Kabupaten	Masih terdapat 22 Kabupaten yang belum mencapai eliminasi filariasis termasuk 16 Kabupaten bermasalah kesehatan
C. Peningkatan Sumberdaya Kesehatan			
1	Cakupan Puskesmas yang memenuhi standar ketenagaan minimal 5 jenis tenaga (perawat, bidan, kesling, gizi, analis kesehatan)	Dari 420 puskesmas di Papua terdapat 68 puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga kondisi ini masih jauh dari standar yang ditetapkan	Masih terdapat 352 puskesmas yang belum mempunyai lima jenis tenaga sesuai standar terutama di 16 Kabupaten Bermasalah Kesehatan
2	Cakupan puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	Ketersediaan Obat dan vaksin sudah mencapai 100 % di Papua kondisi ini sudah cukup baik perlu di tingkatkan	Pengelolaan obat dan vaksin di Papua setiap tahun sudah cukup baik
3	Pelaksanaan Diklat sesuai standar	Jumlah pelatihan dan diklat yang terstandar di Papua sudah cukup baik sebesar 60 %	Masih terdapat 40 % pelatihan yang belum memenuhi standar lebih khusus di 16 daerah bermasalah kesehatan
D. Peningkatan Pelayanan Kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, perluar dan tertentu			

No	INDIKATOR	Analisis Masalah	Isu Strategis
			kesehatan
13	Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Hanya 180 kampung yang aktif melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	Ada 5231 kampung yang tidak aktif posyandunya lebih khusus 16 daerah bermasalah kesehatan
B Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
1	Cakupan Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria	Dari 29 Kabu Paten/Kota di Papua lebih khusus 16 Kabupaten/kota Belum ada yang mencapai Eliminasi Malaria	Angka kasus malaria masih tinggi dengan anual parasit inciden (API) 76,1 % di Provinsi Papua angka ini juga di sumbag oleh 16 kabupaten bermasalah kesehatan
2	Cakupan odha yang mendapatkan pengobatan ARV rutin	25,26 % Odha yang masih aktif minum obat ARV masih banyak yang belum lebih banyak tersebar di 16 daerah bermasalah kesehatan di Papua	74,74 % pasien yang positif HIV/AIDS yang belum mengkonsumsi ARV tersebar di 16 Daerah Bermasalah Kesehatan
3	Cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate / CDR) yang diobati	Angka penemuan kasus TB yang positif cukup tinggi di Papua sebesar 79 %	Dari yang positif TB aktif atau positif banyak yang tidak minum obat secara rutin lebih banyak di 16 Kabupaten bermasalah kesehatan
4	Jumlah kumulatif Kabupaten/Kota dengan 50% Desa/Kelurahan yang melaksanakan posbindu	31,0 % desa yang aktif melaksanakan posbindu	69 % desa dipapua lebih khusus di 16 Daerah Bermasalah kesehatan yang belum aktif melaksanakan posbindu
5	Cakupan Imunisasi dasar lengkap (IDL)	70,1 % bayi, balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	29,1 % bayi balita yang belum melaksanakan imunisasi dasar lengkap tersebar di 16 daerah bermasalah kesehatan

BAB IV

INDIKATOR DAN TARGET

A. Indikator

Untuk mendukung percepatan pembangunan Kesehatan di Provinsi Papua, telah ditetapkan indikator dan target yang harus dicapai sesuai dengan RPJMD Provinsi Papua dan Renstra Dinas Kesehatan, yang terdiri atas : Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas, Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Peningkatan Sumberdaya Kesehatan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, perluar dan tertentu serta Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik khusus pada 16 Daerah Bermasalah Kesehatan tergambar di bawah ini :

1. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas
 - a. Cakupan Distrik memiliki minimal Puskesmas yang bersertifikat akreditasi
 - b. Cakupan rumah sakit yang tersertifikasi akreditasi
 - c. Cakupan orang asli papua tidak mampu yang terlayani menggunakan jaminan Kesehatan Papua.
 - d. Cakupan kunjungan ibu hamil K4
 - e. Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan
 - f. Cakupan neonatus
 - g. Cakupan pelayanan anak balita
 - h. Prevalensi balita sangat kurus dan kurus (Stunting)
 - i. Cakupan masyarakat akses terhadap air bersih
 - j. Cakupan keluarga akses terhadap sanitasi
 - k. Cakupan PHBS
 - l. Cakupan posyandu aktif
2. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a. Cakupan Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria
 - b. Cakupan odha yang mendapatkan pengobatan ARV rutin
 - c. Cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate / CDR) yang diobati
 - d. Jumlah kumulatif Kabupaten/Kota dengan 50% Desa/Kelurahan yang melaksanakan posbindu
 - e. Cakupan Puskesmas yang menyediakan layanan Kesehatan jiwa dan NAPZA
 - f. Cakupan Imunisasi dasar lengkap (IDL)

No	INDIKATOR	Analisis Masalah	Isu Strategis
1	Cakupan puskesmas sesuai standar di daerah perbatasan	Dalam rangka memperkuat NKRI maka puskesmas perlu dibangun di daerah perbatasan	Sebesar 70 – 80 % puskesmas afirmasi telah dibangun di daerah perbatasan
2	Jumlah Kabupaten Kota Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil	Papua dengan tingkat geografis yang sulit atau daerah terpencil kondisi ini menyebabkan banyak layanan yang belum di layani oleh tenaga kesehatan data hanya 13 Kabupaten yang melaksanakan pelayanan kesehatan daerah terpencil	Masih banyak kabupaten yang belum konsisten melaksanakan pelayanan kesehatan daerah terpencil khusus 16 daerah bermasalah kesehatan
3	Jumlah Kabupaten Kota Yang Berkomitmen Untuk Menyediakan SDM Tenaga Kesehatan Bagi Layanan Kesehatan di Daerah	Sumberdaya manusia kesehatan sangat penting untuk papua masih sangat terbatas hanya 13 Kabupaten/kota yang berkomitmen	Masih banyak kabupaten yang belum berkomitmen untuk menyediakan tenaga kesehatan di daerah khusus 16 daerah bermasalah kesehatan
E. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik			
1	Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)	Provinsi Papua nilai sakibnya 80 atau sangat baik belum di Imbangi oleh Kabupaten/kota	Masih banyak kabupaten/kota belum bisa melakukan penyusunan Laporan-laporan pemerintahan daerah dengan baik (Laki, LPPD, LKJ, LKJP) lebih khusus 16 Daerah bermasalah kesehatan

[illegible]

Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Angka cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate / CDR) yang diobati	1	0.75	Cdr		0.8		0.85		0.9		0.95				Balai PP ATM	16 Kab/kota
Kegiatan	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan penemuan dan pengobatan kasus TB di fasilitas kesehatan	Jumlah Peserta Monitoring Evaluasi dan Pembinaan penemuan dan pengobatan kasus TB di fasilitas kesehatan	0	30	Monev	108.900.000	30	119.790.000	30	131.769.000	30	144.945.900	30	159.440.490	150	555.945.390	Balai PP ATM	16 Kab/kota
Program	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Angka notifikasi semua kasus TB (case notification rate / CNR) yang diobati per 100.000 penduduk	301	332	CNR		349		363		381						Balai PP ATM	16 Kab/kota
Kegiatan	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan sistem investigasi kontak	Jumlah Peserta Monitoring Evaluasi dan Pembinaan sistem investigasi kontak	0	30	Orang	108.900.000	30	119.790.000	30	131.769.000	30	144.945.900	30	159.440.490	150	555.945.390	Balai PP ATM	16 Kab/kota
Program	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati	9.813	12458	Kasus		12643		13520		14271						Balai PP ATM	16 Kab/kota
Kegiatan	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Terpadu TB HIV, TB-DM, TB-KIA (TB Anak dan TB pada Ibu Hamil)	Jumlah Peserta Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Terpadu TB HIV, TB-DM, TB-KIA (TB Anak dan TB pada Ibu Hamil)	0	30	Orang	108.900.000	30	119.790.000	30	131.769.000	30	144.945.900	30	159.440.490	150	555.945.390	Balai PP ATM	16 Kab/kota
Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Jumlah Kab / Kota yang mencapai target untuk indikator penertarikan mikroskopis yang mengikuti uji silang	7	16	Kab/kota		20		25		29		29				Balai PP ATM	16 Kab/kota
Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi penemuan kasus TB RO	Jumlah Peserta Monitoring dan Evaluasi penemuan kasus TB RO	0	30	Orang	108.900.000	30	119.790.000	30	131.769.000	30	144.945.900	30	159.440.490	150	555.945.390	Balai PP ATM	16 Kab/kota
Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Cakupan penemuan kasus TB Anak	1.780	2367	Orang		2402		2569		2711						Balai PP ATM	16 Kab/kota
Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi kasus TB anak	Jumlah Peserta Monitoring dan Evaluasi kasus TB anak	0	30	Orang	108.900.000	30	119.790.000	30	131.769.000	30	144.945.900	30	159.440.490	150	555.945.390	Balai PP ATM	16 Kab/kota
Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Penertarikan Kab / Kota yang sudah melaksanakan pengobatan pencegahan dengan INH (PP-INH) untuk anak < 5 tahun	6	29	%		29		29		29		29				Balai PP ATM	16 Kab/kota
Kegiatan	Penyusunan materi promosi PHBS terkait TB	Jumlah Peserta Penyusunan materi promosi PHBS terkait TB	0	20	Orang	18.150.000	20	19.965.000	20	21.961.500	20	24.157.650	20	26.573.415	100	110.807.565	Balai PP ATM	16 Kab/kota
	Pembuatan desain materi PHBS terkait TB	Jumlah Peserta Pembuatan desain materi PHBS terkait TB	0	10	Orang	12.045.000	10	13.249.500	10	14.574.450	10	16.031.895	10	17.635.085	10	17.635.085	Balai PP ATM	16 Kab/kota
	Pencetakan dan pengiriman materi	Jumlah Materi PHBS TB yang dicetak	0	300	Materi	428.605.080	300	469.265.588	300	516.192.147	300	567.811.361	300	624.592.498	1500	2.135.201.086	Balai PP ATM	16 Kab/kota
	Pembinaan dan Monitoring Evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB di Fasilitas kesehatan	Jumlah Peserta Pembinaan dan Monitoring Evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB di Fasilitas kesehatan	0	30	Orang	108.900.000	30	119.790.000	30	131.769.000	30	144.945.900	30	159.440.490	150	555.945.390	Balai PP ATM	16 Kab/kota
Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Penertarikan anak < 5 tahun yang mendapat pengobatan pencegahan dibandingkan estimasi anak < 5 tahun yang memenuhi syarat diberikan pengobatan pencegahan	0	0.55	%		0.6		0.65		0.7		0.75				Balai PP ATM	16 kab/kota

Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Angka cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate / CDR) yang diobati	1	0.75	Cdr		0.8		0.85		0.9		0.95				Balai PP ATM	16 Kab/kota
Kegiatan	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan penemuan dan pengobatan kasus TB di fasilitas kesehatan	Jumlah Peserta Monitoring Evaluasi dan Pembinaan penemuan dan pengobatan kasus TB di fasilitas kesehatan	0	30	Monev	108.900.000	30	119.790.000	30	131.769.000	30	144.945.900	30	159.440.490	150	555.945.390	Balai PP ATM	16 Kab/kota
Program	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Angka notifikasi semua kasus TB (case notification rate / CNR) yang diobati per 100.000 penduduk	301	332	CNR		349		363		381						Balai PP ATM	16 Kab/kota
Kegiatan	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan sistem investigasi kontak	Jumlah Peserta Monitoring Evaluasi dan Pembinaan sistem investigasi kontak	0	30	Orang	108.900.000	30	119.790.000	30	131.769.000	30	144.945.900	30	159.440.490	150	555.945.390	Balai PP ATM	16 Kab/kota
Program	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati	9.813	12458	Kasus		12643		13520		14271						Balai PP ATM	16 Kab/kota
Kegiatan	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Terpadu TB HIV, TB-DM, TB-KIA (TB Anak dan TB pada Ibu Hamil)	Jumlah Peserta Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Terpadu TB HIV, TB-DM, TB-KIA (TB Anak dan TB pada Ibu Hamil)	0	30	Orang	108.900.000	30	119.790.000	30	131.769.000	30	144.945.900	30	159.440.490	150	555.945.390	Balai PP ATM	16 Kab/kota
Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Jumlah Kab / Kota yang mencapai target untuk indikator penertarikan mikroskopis yang mengikuti uji silang	7	16	Kab/kota		20		25		29		29				Balai PP ATM	16 Kab/kota
Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi penemuan kasus TB RO	Jumlah Peserta Monitoring dan Evaluasi penemuan kasus TB RO	0	30	Orang	108.900.000	30	119.790.000	30	131.769.000	30	144.945.900	30	159.440.490	150	555.945.390	Balai PP ATM	16 Kab/kota
Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Cakupan penemuan kasus TB Anak	1.780	2367	Orang		2402		2569		2711						Balai PP ATM	16 Kab/kota
Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi kasus TB anak	Jumlah Peserta Monitoring dan Evaluasi kasus TB anak	0	30	Orang	108.900.000	30	119.790.000	30	131.769.000	30	144.945.900	30	159.440.490	150	555.945.390	Balai PP ATM	16 Kab/kota
Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Penertarikan Kab / Kota yang sudah melaksanakan pengobatan pencegahan dengan INH (PP-INH) untuk anak < 5 tahun	6	29	%		29		29		29		29				Balai PP ATM	16 Kab/kota
Kegiatan	Penyusunan materi promosi PHBS terkait TB	Jumlah Peserta Penyusunan materi promosi PHBS terkait TB	0	20	Orang	18.150.000	20	19.965.000	20	21.961.500	20	24.157.650	20	26.573.415	100	110.807.565	Balai PP ATM	16 Kab/kota
	Pembuatan desain materi PHBS terkait TB	Jumlah Peserta Pembuatan desain materi PHBS terkait TB	0	10	Orang	12.045.000	10	13.249.500	10	14.574.450	10	16.031.895	10	17.635.085	10	17.635.085	Balai PP ATM	16 Kab/kota
	Pencetakan dan pengiriman materi	Jumlah Materi PHBS TB yang dicetak	0	300	Materi	428.605.080	300	469.265.588	300	516.192.147	300	567.811.361	300	624.592.498	1500	2.135.201.086	Balai PP ATM	16 Kab/kota
	Pembinaan dan Monitoring Evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB di Fasilitas kesehatan	Jumlah Peserta Pembinaan dan Monitoring Evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB di Fasilitas kesehatan	0	30	Orang	108.900.000	30	119.790.000	30	131.769.000	30	144.945.900	30	159.440.490	150	555.945.390	Balai PP ATM	16 Kab/kota
Program	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis	Penertarikan anak < 5 tahun yang mendapat pengobatan pencegahan dibandingkan estimasi anak < 5 tahun yang memenuhi syarat diberikan pengobatan pencegahan	0	0.55	%		0.6		0.65		0.7		0.75				Balai PP ATM	16 kab/kota

[illegible]

[illegible]

	Pembangunan Gedung SMK Kesehatan	Tenwujudnya gedung SMK lantai 2	1	1	Unit	2,000,000,000.00	1	2,000,000,000.00	1	2,000,000,000.00	1	2,000,000,000.00	1	2,000,000,000.00	1	2,000,000,000.00	UPT SMK Kesehatan	16 Kabikota
Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran					7,886,566,000		7,893,159,800		7,893,159,800		11,515,140,000		11,515,140,000		11,515,140,000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat	100%	12	Bulan	93,406,200	12 Bulan								12 Bulan		12 Bulan	16 Kabikota
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedia dan Terakannya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	12	Bulan	1,310,660,000	12 Bulan	1,310,660,000	12 Bulan	1,310,660,000	12 Bulan	1,400,000,000	12 Bulan	1,400,000,000	12 Bulan	1,400,000,000	12 Bulan	16 Kabikota
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan Kantor	100%	17	Pkt	1,072,600,000	17 Pkt/Unit	1,072,600,000	17 Pkt/Unit	1,072,600,000	17 Pkt/Unit	1,200,000,000	17 Pkt/Unit	1,200,000,000	17 Pkt/Unit	1,200,000,000	17 Pkt/Unit	16 Kabikota
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perantara kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa pemeliharaan dan surat-surat perantara Kendaraan dinas/operasional	100%	45	Unit	19,500,000	45 Unit	19,500,000	45 Unit	19,500,000	45 Unit	19,500,000	45 Unit	19,500,000	45 Unit	19,500,000	45 Unit	16 Kabikota
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan kebersihan lingkungan Kantor	100%	12	Bulan	1,806,720,000	12 Bulan	1,806,720,000	12 Bulan	1,806,720,000	12 Bulan	2,000,000,000	12 Bulan	2,000,000,000	12 Bulan	2,000,000,000	12 Bulan	16 Kabikota
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Meningkatnya penyediaan pemeliharaan peralatan kerja Kantor	100%	12	Bulan	13,800,000	12 Unit	13,800,000	12 Unit	13,800,000	12 Unit	13,800,000	12 Unit	13,800,000	12 Unit	13,800,000	12 Unit	16 Kabikota
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedia dan Meningkatnya kinerja pemrosesan	100%	27	Unit	422,500,000	27 Unit	422,500,000	27 Unit	422,500,000	27 Unit	500,000,000	27 Unit	500,000,000	27 Unit	500,000,000	27 Unit	16 Kabikota
	Penyediaan barang cetakan dan pengendalian	Tersedia Barang Cetakan dan Barang Pengendalian	100%	12	Bulan	846,620,000	12 Bulan	846,620,000	12 Bulan	846,620,000	12 Bulan	1,000,000,000	12 Bulan	1,000,000,000	12 Bulan	1,000,000,000	12 Bulan	16 Kabikota
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	100%	10	Bulan	256,520,000	10 Bulan	256,520,000	10 Bulan	256,520,000	10 Bulan	3,000,000,000	10 Bulan	3,000,000,000	10 Bulan	3,000,000,000	10 Bulan	16 Kabikota
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedia makan dan minum tamu dan rapat koordinasi	100%	12	Bulan	428,399,800	12 Bulan	428,399,800	12 Bulan	428,399,800	12 Bulan	520,000,000	12 Bulan	520,000,000	12 Bulan	520,000,000	12 Bulan	16 Kabikota
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Laporan koordinasi program kegiatan antar Kabikota dan Pusat	100%	12	Bulan	854,000,000	12 Bulan	854,000,000	12 Bulan	854,000,000	12 Bulan	1,000,000,000	12 Bulan	1,000,000,000	12 Bulan	1,000,000,000	12 Bulan	16 Kabikota
	Penyediaan Jasa Pengamanan	Meningkatnya penjagaan dan pengamanan kantor pemerintah	100%	12	Bulan	861,840,000	12 Bulan	861,840,000	12 Bulan	861,840,000	12 Bulan	861,840,000	12 Bulan	861,840,000	12 Bulan	861,840,000	12 Bulan	16 Kabikota
Program	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur					26,169,959,000		26,169,959,000		26,169,959,000		26,169,959,000		26,169,959,000		26,169,959,000		16 Kabikota
	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung kantor Balai Laboratorium	30	1	Unit	20,547,000,000	1	20,547,000,000	1	20,547,000,000	1					61,641,000,000	12 Bulan	16 Kabikota
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya aktifitas pelayanan aparatur pemerintah	100%	12	Bulan	648,164,000	12 Bulan	648,164,000	12 Bulan	648,164,000	12 Bulan	648,164,000	12 Bulan	648,164,000	12 Bulan	648,164,000	12 Bulan	16 Kabikota
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Perbaikan Kendaraan Operasional dinas OPD	100%	45	Unit	1,317,770,000	45 Unit	1,317,770,000	45 Unit	1,317,770,000	45 Unit	1,317,770,000	45 Unit	1,317,770,000	45 Unit	1,317,770,000	45 Unit	16 Kabikota
	Restorasi/pelembagaan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor OPD pemerintah	100%	12	Bulan	3,657,025,000	12 Bulan	3,657,025,000	12 Bulan	3,657,025,000	12 Bulan	3,657,025,000	12 Bulan	3,657,025,000	12 Bulan	3,657,025,000	12 Bulan	16 Kabikota
Program	Peningkatan disiplin aparatur																	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedia Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara OPD	100%	364	Stel	360,000,000	364 Stel	360,000,000	364 Stel	360,000,000	364 Stel	400,000,000	364 Stel	500,000,000	364 Stel	600,000,000	364 Stel	16 Kabikota
Program	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					1,820,500,000		1,964,500,000		2,200,000,000		2,200,000,000		2,350,000,000		1,640,000,000		16 Kabikota
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan pelatihan formal	100%	10	Org	866,000,000	10 Org	1,000,000,000	10 Org	1,100,000,000	10 Org	1,100,000,000	10 Org	1,100,000,000	10 Org	1,300,000,000	10 Org	16 Kabikota
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan pelatihan non formal	100%	12	Bulan	954,500,000	12 Bulan	954,500,000	12 Bulan	1,100,000,000	12 Bulan	1,100,000,000	12 Bulan	1,250,000,000	12 Bulan	1,340,000,000	12 Bulan	16 Kabikota
Program	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keberanghatan																	

16 Kabikota	5	750,000,000	2	300,000,000	1	250,000,000	1	210,000,000	1	-	0		Dokumen	1	100%	Review dan evaluasi kinerja dinas kesehatan Provinsi	16 Kabikota	
16 Kabikota	16	1,124,297,403	16	1,124,297,403	16	1,124,297,403	16	1,124,297,403	16	1,124,297,403	16	1,124,297,403	Kabikota	Jumlah	100%	Review dan evaluasi kinerja dinas kesehatan Provinsi	16 Kabikota	
16 Kabikota	20 Kab	389,900,000	20 Kab	389,900,000	20 Kab	389,900,000	20 Kab	389,900,000	20 Kab	389,900,000	20 Kab	389,900,000	Dokumen	Jumlah	100%	Review dan evaluasi kinerja dinas kesehatan Provinsi	16 Kabikota	
16 Kabikota	1 Pkt	1,045,500,000	1 Pkt	1,045,500,000	1 Pkt	1,045,500,000	1 Pkt	1,045,500,000	1 Pkt	1,045,500,000	1 Pkt	1,045,500,000	Dokumen	Jumlah	100%	Review dan evaluasi kinerja dinas kesehatan Provinsi	16 Kabikota	
16 Kabikota																		
16 Kabikota	12 Bulan	120,000,000	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	120,000,000	12 Bulan	103,000,000	12 Bulan	103,000,000	12 Bulan	103,000,000	Bulan	12 Bulan	100%	Review dan evaluasi kinerja dinas kesehatan Provinsi	16 Kabikota	
16 Kabikota	12 Bulan	120,000,000	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	80,000,000	12 Bulan	51,500,000	12 Bulan	51,500,000	12 Bulan	51,500,000	Bulan	12 Bulan	100%	Review dan evaluasi kinerja dinas kesehatan Provinsi	16 Kabikota	
16 Kabikota	12 Bulan	120,000,000	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	80,000,000	12 Bulan	51,500,000	12 Bulan	51,500,000	12 Bulan	51,500,000	Bulan	12 Bulan	100%	Review dan evaluasi kinerja dinas kesehatan Provinsi	16 Kabikota	
16 Kabikota	12 Bulan	120,000,000	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	80,000,000	12 Bulan	51,500,000	12 Bulan	51,500,000	12 Bulan	51,500,000	Bulan	12 Bulan	100%	Review dan evaluasi kinerja dinas kesehatan Provinsi	16 Kabikota	

1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,014,904,630	126,885,000	0	0	1,141,789,630	1,014,904,630	126,885,000	0	0	1,141,789,630	0	16 Kab/kota
1	02	02	1.01	05	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	16 Kab/kota
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,696,000,000	549,000,000	0	0	3,245,000,000	500,000,000	2,745,000,000	0	0	3,245,000,000	0	16 Kab/kota
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,422,572,222	27,731,977	0	0	4,450,304,199	4,422,572,222	27,731,977	0	0	4,450,304,199	0	16 Kab/kota
1	02	02	1.01	20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275,540,715	0	0	0	275,540,715	275,540,715	0	0	0	275,540,715	0	16 Kab/kota
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,057,077,037	128,570,000	0	0	4,185,647,037	4,057,077,037	128,570,000	0	0	4,185,647,037	0	16 Kab/kota
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,784,270,047	1,012,267,860	0	0	3,796,537,907	2,784,270,047	1,012,267,860	0	0	3,796,537,907	0	16 Kab/kota
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			67,445,838,316	3,119,262,767	0	0	70,565,101,083	69,049,172,292	4,162,737,394	0	0	72,211,909,686	1,646,808,603	16 Kab/kota

1	02	02	1.02	08	Pengembangan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,058,652,875	264,700,000	0	0	1,323,352,875	1,058,652,875	264,700,000	0	0	1,323,352,875	0	16 Kab/kota
1	02	02	1.02	07	Pengembangan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,664,575,500	185,374,500	0	0	1,849,950,000	1,664,575,500	185,374,500	0	0	1,849,950,000	0	16 Kab/kota
1	02	02	1.02	06	Pengembangan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,477,129,303	450,000	0	0	31,477,579,303	31,477,129,303	450,000	0	0	31,477,579,303	0	16 Kab/kota
1	02	02	1.02	05	Pengembangan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Dana (Otonomi Khusus Provinsi Papua)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,250,000	0	0	0	149,250,000	149,250,000	0	0	0	149,250,000	0	16 Kab/kota
1	02	02	1.02	03	Pengembangan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Dana (Otonomi Khusus Provinsi Papua)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	846,900,000	0	0	0	846,900,000	846,900,000	0	0	0	846,900,000	0	16 Kab/kota
1	02	02	1.02	01	Pengembangan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Dana (Otonomi Khusus Provinsi Papua)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	929,425,000	605,703,500	0	0	1,535,128,500	929,425,000	605,703,500	0	0	1,535,128,500	0	16 Kab/kota

1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota a. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,499,370,160	0	0	0	1,499,370,160	1,499,370,160	0	0	0	1,499,370,160	0	16 Kab/kota
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota a. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,432,253,086	904,006,323	0	0	15,336,259,409	15,509,132,911	1,014,606,323	0	0	16,523,739,234	1,187,479,825	16 Kab/kota
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayan Kesehatan Haji (Dinas Kesehatan)	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota a. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,240,425	750,000	0	0	79,990,425	78,381,675	1,500,000	0	0	79,881,675	(108,750)	16 Kab/kota
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dinas Kesehatan)	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota a. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109,950,000	0	0	0	109,950,000	109,950,000	0	0	0	109,950,000	0	16 Kab/kota
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota a. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,400,000	0	0	0	86,400,000	463,835,730	0	0	0	463,835,730	377,435,730	16 Kab/kota
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota a. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,142,368,996	5,700,000	0	0	3,148,068,996	2,969,777,437	640,163,500	0	0	3,609,940,937	461,871,941	16 Kab/kota
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota a. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,389,926,795	21,032,000	0	0	2,410,958,795	1,378,967,845	21,032,000	0	0	1,399,966,845	(1,010,958,950)	16 Kab/kota

1	02	03	1.02	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	Peningkatan Kelembagaan (Dinas Kesehatan) Inovasi Daerah (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota a. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,756,647,675	155,620,931	0	0	4,912,268,606	5,680,396,730	5,680,396,730	397,397,431	0	6,077,794,161	1,166,535,555	16 Kab/kota
1	02	03	1.01	1	Pengembangan Kelembagaan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kelembagaan (Dinas Kesehatan) Inovasi Daerah (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota a. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,115,346,554	1,153,303,000	0	0	6,268,649,554	5,238,789,754	5,238,789,754	2,780,303,000	0	8,009,092,754	1,740,443,200	16 Kab/kota
1	02	03	1.01	1	Pengembangan Kelembagaan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kelembagaan Sumber Daya Manusia		5,115,346,554	1,153,303,000	0	0	6,268,649,554	5,238,789,754	5,238,789,754	2,780,303,000	0	8,009,092,754	1,740,443,200	16 Kab/kota
1	02	03			MAKASIA KEMAHAYAN			9,871,994,279	1,308,923,931	0	0	11,180,918,160	10,909,186,484	10,909,186,484	3,177,700,431	0	14,086,886,915	2,906,968,755	16 Kab/kota
1	02	03	1.04	1	Pengembangan Kelembagaan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kelembagaan (Dinas Kesehatan) Inovasi Daerah (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota a. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,905,485,840	4,743,850	0	0	6,910,229,690	6,338,101,629	6,338,101,629	432,743,850	0	6,762,760,089	(146,469,601)	16 Kab/kota
1	02	03	1.04	1	Pengembangan Kelembagaan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kelembagaan (Dinas Kesehatan) Inovasi Daerah (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota a. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,206,600,420	17,857,000	0	0	1,224,457,420	1,206,600,420	1,206,600,420	17,857,000	0	1,224,457,420	0	16 Kab/kota
1	02	03	1.04	1	Pengembangan Kelembagaan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kelembagaan Sumber Daya Manusia		8,112,086,260	22,600,850	0	0	8,134,687,110	7,537,616,659	7,537,616,659	450,600,850	0	7,988,217,509	(146,469,601)	16 Kab/kota
1	02	03	1.03	1	Pengembangan Kelembagaan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kelembagaan (Dinas Kesehatan) Inovasi Daerah (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota a. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	744,110,000	27,500,000	0	0	771,610,000	774,110,000	774,110,000	27,500,000	0	801,610,000	30,000,000	16 Kab/kota
1	02	03	1.03	1	Pengembangan Kelembagaan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kelembagaan (Dinas Kesehatan) Inovasi Daerah (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota a. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	744,110,000	27,500,000	0	0	771,610,000	774,110,000	774,110,000	27,500,000	0	801,610,000	30,000,000	16 Kab/kota
1	02	03	1.02	28	Pengelolaan Pelayan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota a. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119,990,185	0	0	119,990,185	119,990,185	119,990,185	0	0	119,990,185	0	16 Kab/kota	
1	02	03	1.02	26	Pengelolaan Pelayan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota a. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,967,255,941	1,124,696,444	0	0	10,091,952,385	9,546,386,941	9,546,386,941	1,297,737,571	0	10,844,144,512	752,192,127	16 Kab/kota
1	02	03	1.02	24	Pengelolaan Pelayan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota a. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	493,150,050	6,850,000	0	0	500,000,050	493,150,050	493,150,050	6,850,000	0	500,000,050	0	16 Kab/kota

1	02	04	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,756,647,675	155,620,931	0	0	4,912,268,606	5,680,396,730	397,397,431	0	0	6,077,794,161	1,165,525,555	16 Kab/kota
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			397,074,046	0	0	0	397,074,046	397,074,046	0	0	0	397,074,046	0	16 Kab/kota
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Peladang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)			397,074,046	0	0	0	397,074,046	397,074,046	0	0	0	397,074,046	0	16 Kab/kota
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK (Dinas Kesehatan)	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237,474,046	0	0	0	237,474,046	237,474,046	0	0	0	237,474,046	0	16 Kab/kota
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik (Dinas Kesehatan)	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	159,600,000	0	0	0	159,600,000	159,600,000	0	0	0	159,600,000	0	16 Kab/kota
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN TEKNIK SARAFAT BERKUALITAS			2,918,065,701	479,900,000	0	0	3,397,965,701	2,553,395,886	479,900,000	0	0	3,033,295,886	(364,609,815)	16 Kab/kota
1	02	05	1.01		Aktivasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			680,219,413	7,500,000	0	0	687,719,413	680,219,413	7,500,000	0	0	687,719,413	0	16 Kab/kota

1	02	05	1.03		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	296,001,368	0	0	0	296,001,368	296,001,368	0	0	0	296,001,368	0	16 Kab/kota
1	02	05	1.03		Daya Masyarakat (KBM) Tingkat Daerah Provinsi			296,001,368	0	0	0	296,001,368	296,001,368	0	0	0	296,001,368	0	16 Kab/kota
1	02	05	1.02		Pengembangan dan Pelaksanaan (KIP) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,941,784,920	472,400,000	0	0	2,414,184,920	1,577,175,105	472,400,000	0	0	2,049,575,105	(364,609,815)	16 Kab/kota
1	02	05	1.02		Hubung Persepsi dan Sehat dalam rangka Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (KIP) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,941,784,920	472,400,000	0	0	2,414,184,920	1,577,175,105	472,400,000	0	0	2,049,575,105	(364,609,815)	16 Kab/kota
1	02	05	1.01		Peningkatan Kemampuan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	680,219,413	7,500,000	0	0	687,719,413	680,219,413	7,500,000	0	0	687,719,413	0	16 Kab/kota

Pencapaian Tujuan,Sasaran Indikator Dan Target Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesehatan Pada 16 Daerah Bermasalah Kesehatan Di Papua Tahun 2021 -2025

N0	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/TUJUAN	Target	Base line 2020	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE 2020				
							2021	2022	2023	2024	2025
-1	-2	-3	-4		5	6	7	8	9	10	11
	Mewujudkan papua sehat yang berkeadilan	Meningkatnya Akses pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas	Cakupan Distrik memiliki minimal Puskesmas yang bersertifikat akreditasi	50	12.8	%	20	30	40	45	50
		Meningkatnya Akses pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas	Cakupan rumah sakit yang tersertifikasi akreditasi	100	56	%	60	80	85	90	100
		Meningkatnya Akses pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas	Cakupan orang asli papua tidak mampu yang terlayani menggunakan jaminan Kesehatan Papua	100	100	%	100	100	100	100	100
		Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	100	27.2	%	30	35	40	60	100
		Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas	Cakupan pertolongan di persalinan fasilitas kesehatan	85	44.2	%	50	60	70	80	85
		Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas	Angka Kematian Ibu	170	199.6	Ibu	190	185	180	175	170
		Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas	Angka Kematian Bayi	0	6	Bayi	6	6	6	5	0
		Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas	Prevalensi balita sangat kurus dan kurus (Stunting)	14	19	%	18	17	16	15	14

		Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas	Cakupan masyarakat terhadap air bersih	45	30.23	%	33	36	40	41	45
		Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas	Cakupan keluarga akses terhadap sanitasi aman	38.7	%	40	45	50	55	60	65
		Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas	Cakupan PHBS	70	45	%	50	55	60	65	70
		Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas	Cakupan Posyandu aktif	70	31	%	40	50	55	60	70
		Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas	Cakupan Sanitasi Total	260	180	Kampung	190	200	240	250	260
		Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit malaria	Cakupan Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria	3	0	Kab/kota	0	0	0	2	1
		Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit Cakupan odha yang mendapatkan pengobatan ARV rutin	60	25.36	%	30	30	30	40	50	60
		Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit Cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate / CDR) yang diobati	90	40	%	50	60	70	80	90	90
		Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit Jumlah kumulatif Kabupaten/Kota dengan 50% Desa/Kelurahan yang melaksanakan posbindu	55	31	%	35	45	50	52	55	55
		Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit Cakupan Imunisasi dasar lengkap (IDL)	90	70.1	%	72.3	75	80	85	90	90

TAHUN 2021-2025

Keterangan :

31

30

[illegible]